

**Inovasi Kartu Petani Mandiri (KPM) Plus dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Petani oleh Dinas Pertanian Kabupaten Bojonegoro**

**Nurudin Abdurohim**

S1 Ilmu Administrasi Negara, Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum

Universitas Negeri Surabaya

[nurudin.18131@mhs.unesa.ac.id](mailto:nurudin.18131@mhs.unesa.ac.id)

**Meirinawati**

S1 Ilmu Administrasi Negara, Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum

Universitas Negeri Surabaya

[meirinawati@unesa.ac.id](mailto:meirinawati@unesa.ac.id)

**Abstrak**

Kartu Petani Mandiri (KPM) Plus merupakan inovasi baru dari Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Penerbitan kartu tersebut adalah upaya dari Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani di Kabupaten Bojonegoro, sesuai tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2019. Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mendeskripsikan Inovasi Kartu Petani Mandiri (KPM) Plus dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Petani oleh Dinas Pertanian Kabupaten Bojonegoro. Peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data terdiri dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan mengumpulkan data, mereduksi data, menyajikan data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini menggunakan fokus penelitian manajemen inovasi menurut Utomo, terdapat lima tahap manajemen inovasinya antara lain, 1) Eksplorasi Ide dan Kebutuhan Inovasi dalam penerbitan Kartu ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat Petani di Kabupaten Bojonegoro. 2) Inkubasi Inovasi, rencana telah disusun sebelumnya oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam menjalankan program petani mandiri dimana pendanaan program ini bersumber dari APBD. 3) Diseminasi atau Difusi Inovasi, Penyebaran informasi dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui media online dan cetak. 4) Adopsi/Replikasi/Modifikasi Inovasi, Penerbitan Kartu ini merupakan program yang bagus, terbukti Instansi pemerintah luar kota ingin mengadopsinya. 5) Aktualisasi Inovasi, merupakan sebuah pertanggungjawaban atas terlaksananya program ini, kegiatan monitoring dan evaluasi wajib dilakukan supaya inovasi berjalan baik dan tepat sasaran. Kedepannya diharapkan Dinas Pertanian Kabupaten Bojonegoro lebih getol lagi dalam mensosialisasikan program ini, dan bekerjasama dengan perusahaan swasta atau BUMN dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas program ini.

**Kata Kunci : Inovasi Pertanian, Kartu Petani Mandiri (KPM) Plus, Kesejahteraan Petani**

**Abstract**

Kartu Petani Mandiri (KPM) Plus is an innovation from Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. The issuance of the card is an effort by the Pemerintah Kabupaten Bojonegoro to improve the welfare of farmers in Bojonegoro Regency, as stated in Regent Regulation Number 20 of 2019. This program is intended for farmers who are members of Poktan (farmers). The purpose of this research is to describe the Innovation of Kartu Petani Mandiri (KPM) Plus in to improve the welfare of farmers by the Dinas Pertanian Kabupaten Bojonegoro. Researchers used descriptive research with a qualitative approach. Data collection techniques consisted of observation, interviews, and documentation. The data analysis technique is done by collecting data, reducing data, presenting data, and drawing conclusions. This study uses the focus of innovation management research according to Utomo, there are five stages of innovation management, namely, 1) Exploration of Ideas and Innovation Needs in the issuance of this card is needed by the Farmer community in Bojonegoro Regency. 2) Innovation Incubation, plans have been prepared in advance by the Bojonegoro Regency Government in running the independent farmer program where funding for this program comes from the APBD. 3) Dissemination or Diffusion of Innovation, Information dissemination is carried out by the Bojonegoro Regency Government through online and print media. 4) Adoption / Replication / Innovation Modification, this Card Issuance is a good program, it is proven that government agencies outside the city want to adopt it. 5) Actualization of Innovation, is an accountability for the implementation of this program, monitoring and evaluation activities must be carried out so that innovation runs well and is right on target. In the future, it is hoped that the Dinas Pertanian Kabupaten Bojonegoro will be more diligent in socializing this program, and collaborating with private companies or BUMN in order to improve the quality and quantity of this program.

**Keywords: Agriculture Innovation, Kartu Petani Mandiri (KPM) Plus, Farmer Welfare**

## PENDAHULUAN

Negara Indonesia ialah negara agraris dimana mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani, tidak bisa dipungkiri masyarakat Indonesia menggantungkan hidupnya dari sektor pertanian, karena tanahnya yang subur cocok untuk bercocok tanam. Pramdia Arhando Julianto dalam berita kompas.com mengatakan bahwa “tercatat di Badan Pusat Statistik (BPS) angka kerja disektor pertanian yaitu 38,29 persen pada Februari 2016” (Arhando, 2017). Angka tersebut menjadi sesuatu yang perlu diperhatikan mengingat petani adalah pahlawan bangsa.

Petani tersebar luas diberbagai penjuru Indonesia dengan berbagai macam suku, agama, ras serta ekonomi dengan pendapatan yang berbeda. Kegagalan petani disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal yaitu cuaca, serangan hama dan iklim. Faktor internal sempitnya lahan pertanian yang dimiliki, kemampuan manajemen dan kurangnya modal dari segi ekonomi setiap petani (Kurniati, 2015).

Kejadian iklim ekstrim akan menyebabkan beberapa hal, diantaranya: (a) kegagalan panen dan tanam, yang berujung pada penurunan produktivitas dan produksi; (b) kerusakan sumberdaya lahan pertanian; (c) peningkatan intensitas banjir/kekeringan; (d) peningkatan kelembaban; dan peningkatan intensitas organisme pengganggu tanaman (Nuraisah & Budi Kusumo, 2019).

Permasalahan yang saat ini dihadapi Kabupaten Bojonegoro dibidang pertanian adalah kesulitan dalam mendapatkan pupuk dan serangan hama, kedua masalah ini yang mengakibatkan gagal panen. Perlu diketahui bahwasanyapupuk adalah faktor penting dalam menunjang kebutuhan petani, oleh karena itu, masalah ini menjadi persoalan yang harus segera ditangani oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Lambat laun keadaan ini sangat mengganggu eksistensi dari petani dan timbul keresahan dalam kehidupan petani.

Masalah muncul lagi ketika petani dihadapkan dengan serangan hama, yang merusak tanaman para petani, Keresahan tersebut menimbulkan tuntutan dari masyarakat kepada Pemerintah Kabupaten Bojonegoro untuk menghadapi berbagai permasalahan pertanian di Kabupaten Bojonegoro. Peran pemerintah sangat diperlukan untuk mencari dan menemukan suatu solusi dalam mengatasi masalah tersebut.

Masyarakat petani di Bojonegoro harus mendapatkan perhatian yang serius dari Pemerintah dalam bentuk perlindungan dan pemberdayaan usaha tani sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani pasal 3 yang bertujuan untuk: (a) mewujudkan kedaulatan dan

kemandirian Petani dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kehidupan yang lebih baik; (b) menyediakan prasarana dan sarana Pertanian yang dibutuhkan dalam mengembangkan Usaha Tani; (c) memberikan kepastian Usaha Tani; (d) melindungi Petani dari fluktuasi harga, praktik ekonomi biaya tinggi, dan gagal panen; (e) meningkatkan kemampuan dan kapasitas Petani serta Kelembagaan Petani dalam menjalankan Usaha Tani yang produktif, maju, modern dan berkelanjutan; dan (f) menumbuhkembangkan kelembagaan pembiayaan Pertanian yang melayani kepentingan Usaha Tani.

Solusi untuk menghadapi kesejahteraan petani ini harus ada suatu pembaruan berjangka panjang. Mengingat pekerjaan bertani/bercocok tanam ini adalah kegiatan terus menerus. Menurut (Thahier, 2014), “Keberhasilan inovasi sangat ditentukan oleh kreativitas manusia, bagi manusia yang tidak kreatif, maka inovasipun sulit dikembangkan”

Tuntutan untuk melakukan Inovasi telah tercantum pada Undang-Undang no 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah pada bab XXI Inovasi Daerah pasal 386 sampai dengan 390. Inovasi yang dimaksud pada isi undang-undang tersebut adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang di pasal 387 dinyatakan bahwa dalam merumuskan kebijakan inovasi, pemerintahan daerah mengacu pada prinsip: peningkatan efisiensi; perbaikan efektivitas; perbaikan kualitas pelayanan; tidak ada konflik kepentingan; berorientasi kepada kepentingan umum; dilakukan secara terbuka; memenuhi nilai-nilai kepatutan; dan dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri.

Dalam proses inovasi tentunya perlu sebuah tujuan yang jelas dan yang utama adalah tepat sasaran dalam penerapannya, karena inovasi membutuhkan visi dan strategi, proses yang tepat untuk menerapkan inovasi, dan kondisi dan budaya organisasi yang memfasilitasi kemunculannya dan implementasinya (Solaimani, Haghghi Talab, & van der Rhee, 2019).

Inovasi menurut Cooke (Dodescu & Chirilă, 2012) adalah inovasi merupakan mesin pertumbuhan ekonomi dan, guna menciptakan sosial ekonomi yang layak sebagai kerangka program kerja dan untuk pengembangan inovasi, sektor daerah sangatlah penting. Penciptaan ide-ide baru haruslah memperhatikan dampak dari terciptanya inovasi, yang nantinya akan berimbas bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Inovasi yang baik ialah inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat, hal ini seperti apa yang diungkapkan oleh (Asmara & Rahayu, 2019) inovasi pelayanan publik ialah hasil akhir dari organisasi publik



2. Yuni Arba'atun (Kepala Seksi Investasi dan Pembiayaan Usaha Tani Dinas Pertanian Kabupaten Bojonegoro)
3. Mashuri (Ketua Kelompok Tani Desa Grebegan)
4. Nur Hayan (Ketua PC PMII Kabupaten Bojonegoro)

Peneliti menggunakan teori manajemen inovasi sebagai Fokus Penelitian yang diambil untuk membahas Inovasi Kartu Petani mandiri (KPM) Plus dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Petani oleh Dinas Pertanian Kabupaten Bojonegoro adalah teori manajemen inovasimenurut Utomo (2017:127) yang terdiri dari lima karakteristik inovasi meliputi :

Eksplorasi Ide dan Kebutuhan Inovasi, pada eksplorasi ide ini bertujuan untuk menemukan sesuatu hal yang baru. Sedangkan kebutuhan inovasi adalah dalam pembentukan inovasi haruslah melihat terkait kebutuhan apa yang diperlukan agar dalam pembuatan inovasinya sesuai dengan kebutuhan sehingga inovasi tersebut tidaklah sia-sia. Kedua hal tersebut saling bergantung dikarenakan untuk mencari inovasi yang tepat haruslah sesuai dengan kebutuhan suatu instansi. inkubasi inovasi, inkubasi memiliki pengertian khusus yaitu proses penjagaan atau perawatan pada kondisi tertentu. Sedangkan kalau inkubasi inovasi adalah mengenai kesiapan suatu instansi mengenai penerapan inovasi yang dibuatnya. Jadi instansi yang bersangkutan sudah memikirkan matang-matang terkait kesiapan apa saja yang dibutuhkannya. diseminasi inovasi atau difusi inovasi, diseminasi memiliki tujuan untuk menginspirasi pihak lain. Sedangkan difusi memiliki arti penyebaran jadi kalau digabungkan memiliki pengertian suatu instansi dapat menginspirasi instansi lainnya dengan inovasi yang dibuatnya. Pada indikator ini membahas tentang percepatan dan pertukaran informasi mengenai inovasi. adopsi/replikasi/modifikasi inovasi, pada tahap indikator ini diperoleh bukti bahwa suatu instansi boleh saja mengadopsi suatu inovasi yang ada pada instansi lainnya. Instansi yang ingin mengadopsi inovasi dari instansi lainnya haruslah memodifikasi inovasi tersebut untuk dapat terhindar dari praktek plagiarisme atau penjiplakan. Biasanya inovasi yang diadopsi akan dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan pelayanan dari instansi terkait. dan aktualisasi inovasipada indikator ini membahas mengenai pelaksanaan inovasi yang diselenggarakan instansi pemerintah daerah. Dalam pelaksanaannya terdapat kegiatan monitoring dan juga evaluasi. Dari kegiatan monitoring dan evaluasi tersebut diharapkan penerapan inovasinya akan menjadi lebih baik untuk kedepannya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Jenis tanah yang ada di Bojonegoro adalah Alluvial, Grumosol, Litosol, dan Mediteran. Sektor unggulan yang menjadi potensi bidang pertanian di Bojonegoro ialah padi, kacang tanah dan tembakau, hal tersebut dipengaruhi oleh jenis tanah yang ada di Bojonegoro. Upaya-upaya yang sudah dilakukan pada bidang pertanian kabupaten Bojonegoro cukup baik. Upaya

tersebut yaitu yang pertama optimalisasi pertanian, revitalisasi agribisnis diversifikasi pertanian dan fasilitasi bagi petani yang akan menyewa atau memiliki lahan melalui kredit lunak, Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) memberikan perlindungan kepada petani dari ancaman resiko gagal panen.

Inovasi merupakan sebuah penemuan baru, dimana gagasan tersebut belum pernah ada sebelumnya. Inovasi Kartu Petani Mandiri (KPM) Plus adalah salah satu terobosan baru yang diciptakan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Bojonegoro. Program ini hadir sebagai solusi untuk para petani Kabupaten Bojonegoro, Penerbitan Kartu Petani Mandiri ini didasari oleh Peraturan Bupati No. 20 Tahun 2019, adapun manfaat dari Program Kartu Petani Mandiri (KPM) Plus ini adalah sesuai dengan (Peraturan Bupati No. 20 Tahun 2019 pasal 2) :

- a. Memberikan akses bagi rumah tangga/keluarga petani untuk mendapatkan bantuan modal yang berwujud barang dengan nilai maksimal Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
- b. Memberikan akses prioritas pelatihan dan pengembangan usaha tani;
- c. Jaminan pembelian hasil pertanian bekerjasama dengan BUMDes dan BUMD; dan;
- d. Asuransi gagal panen dan/atau peternakan; dan
- e. Sebagai akses untuk memperoleh beasiswa bagi keluarga petani.

Adapun syarat untuk mendapatkan Kartu Petani Mandiri (KPM) Plus adalah :

- a. Tergabung dalam kelompok tani;
- b. Lahan pertaniankurang dari 2 Ha;
- c. Fotokopi Kartu Keluarga;
- d. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan Kependudukan dan Catatan Sipil;
- e. Fotokopi Sertifikat Kepemilikan tanah atau Surat Keterangan yang dikeluarkan Kepala Desa/Lurah setempat disertai bukti fotokopi SPPT PBB.

Dengan adanya program ini, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menemukan solusi untuk para petani, berbagai masalah pertanian akan teratasi dengan menggunakan kartu ini. Dampak yang dirasakan oleh masyarakat sangat signifikan, yang semula takut untuk bercocok tanam sekarang ketakutan tersebut hilang karena petani tidak khawatir karena Pemerintah mendampingi proses para petani pada saat sebelum menanam dan sesudah memanen.

(Siagian & Ikatrinasari, 2019)inovasi adalah transformasi pengetahuan kepada produk, proses dan jasa baru, tindakan menggunakan sesuatu yang baru.Tahap berikutnya untuk membuktikan pernyataan tersebut secara lebih rinci terkait inovasi Kartu Petani Mandiri (KPM) Plus, peneliti melakukan penelitian ini menggunakan teori manajemen inovasi yang diutarakan oleh Utomo (2017:127) meliputi eksplorasi ide serta kebutuhan inovasi, inkubasi inovasi, diseminasi atau difusi inovasi, adopsi/replikasi/modifikasi inovasi dan aktualisasi inovasi. Dibawah ini akandijelaskan point-point pada setiap indikator manajemen inovasi berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh peneliti:

### **Eksplorasi Ide dan Kebutuhan Inovasi**

Eksplorasi ide adalah kegiatan yang bertujuan untuk mendapatkan sesuatu hal yang kreatif dan baru. Kebutuhan inovasi yaitu kegiatan melihat kebutuhan yang diperlukan dalam pembentukan inovasi agar berjalan sesuai tujuan. Kedua Pengertian diatas saling terkait dalam kebutuhan suatu instansi dikarenakan untuk mendapatkan inovasi harus tepat tujuan dan berdaya guna.

Sementara itu, menurut (McDermott & Prajogo, 2012) Eksplorasi inovasi sering dikaitkan dengan terobosan atau pemikiran radikal dari sebuah inovasi. Eksplorasi Ide Inovasi merupakan konsep dasar dari sebuah Inovasi, karena membutuhkan pemikiran yang maju dalam membangun sebuah inovasi, jika dalam perencanaan inovasi tersebut baik maka implementasi inovasi juga akan berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan.

Dalam proses perumusan inovasi selalu membutuhkan ide-ide yang brilian dalam penciptannya. Kerangka dasar dari eksplorasi ini adalah untuk mendapatkan sebuah gagasan yang baru, dimana konsep tersebut belum pernah ada sebelumnya. Oleh karena itu di sebuah instansi menciptakan sebuah inovasi haruslah baru, dan belum pernah ditemukan sebelumnya. Pembuatan program ini tentunya memerlukan riset atau sebuah penelitian dengan cara terjun ke lapangan. Dalam proses terjun ke lapangan, tentunya memerlukan sebuah narasumber yaitu tak lain petani itu sendiri, dengan begitu, Dinas Pertanian selaku penggagas program ini bisa mendengar apa yang dikeluhkan oleh masyarakat.

Hal ini disampaikan oleh Ibu Yuni selaku Kepala Seksi Investasi dan Pembiayaan Usaha Tani Dinas Pertanian Kabupaten Bojonegoro :

“Program ini adalah salah satu dari 17 program priotitas yang merupakan gagasan dari Bupati Bojonegoro, beliau melihat ada beberapa masalah yang belum terselesaikan di sektor pertanian, oleh karena itu munculah ide untuk menerbitkan kartu ini

dengan manfaat yang nantinya dapat di rasakan dampak positifnya bagi para petani, kami tim penyuluhan juga menemukan masalah yang dihadapi petani pada saat melakukan kegiatan penyuluhan dengan kelompok tani”.

Kelangkaan pupuk menjadi masalah yang utama bagi petani di Kabupaten Bojonegoro, hal ini menyebabkan hasil panen yang tidak maksimal, karena masa pemupukan harus tepat, jika proses pemupukan mengalami keterlambatan maka pupuk tersebut tidak lagi bermanfaat bagi tanaman. Oleh sebab itu Pemerintah Kabupaten Bojonegoro tergerak untuk menciptakan sebuah solusi dalam menanggulangi permasalahan yang sedang di hadapi oleh para petani di Kabupaten Bojonegoro.

Hal ini turut disampaikan oleh Ibu Yuni selaku Kepala Seksi Investasi dan Pembiayaan Usaha Tani Dinas Pertanian Kabupaten Bojonegoro :

“Kelangkaan pupuk, gagal panen, serangan hama, harga gabah anjlok merupakan masalah-masalah yang sering kita jumpai di masyarakat, oleh sebab itu kami di tunjuk sebagai eksekutor program petani mandiri ini oleh Bupati, yang tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat petani di Kabupaten Bojonegoro khususnya bagi mereka yang kurang mendapatkan akses pengembangan usahanya, dengan hadirnya Kartu ini diharapkan bisa menjadi obat bagi para petani.”

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menjawab keluhan masyarakat dengan menciptakan sebuah Kartu Petani Mandiri (KPM) Plus melalui program petani mandiri, petani bisa mendapatkan pupuk dengan mudah, karena program ini Memberikan akses untuk keluarga petani dalam mendapatkan bantuan modal yang berupa barang dengan nilai maksimal Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan menjamin kemudahan bagi para petani untuk mendapatkan pupuk pertanian, tentunya bantuan pupuk sangat membantu bagi para petani.

Salah satu petani yang mendapatkan bantuan program petani mandiri ini mengungkapkan :

“bantuan pupuk dan benih ini sangat membantu”

Ungkap Burhanuddin salah satu petani di Desa Wedi Kecamatan Kapas.

Tanggapan positif juga disampaikan oleh M. Nur Hayan selaku Ketua Cabang PMII Bojonegoro :



“Dengan dilaunchingnya KPM ini, menjadi angin segar bagi semua petani untuk ikut andil dalam mengakses program tersebut”.

Kartu Petani Mandiri (KPM) Plus merupakan inovasi yang baru yang diciptakan oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, program ini bertujuan untuk menyejahterakan petani, program tersebut merupakan solusi bagi petani sekaligus jawaban atas berbagai permasalahan di sektor pertanian.

### **Inkubasi Inovasi**

Inkubasi inovasi adalah proses pematangan persiapan apa saja yang dibutuhkan dari pihak instansi mengenai kegiatan penerapan inovasi yang telah dirancang. Kegiatan inkubasi ini sangatlah penting karena menjadi acuan pengaruh keberhasilan suatu inovasi yang diterapkan. Oleh karena itu pada indikator ini akan membahas sampai sejauh mana kesiapan dan kebutuhan Dinas Pertanian Kabupaten Bojonegoro dalam menerapkan inovasi Kartu Petani Mandiri (KPM) Plus.

Menurut (Permatasari, 2015) Inkubasi inovasi adalah penerapan program tertentu untuk mengembangkan ide/inisiatif inovasi, yang dilakukan pada periode tertentu yakni sejak munculnya gagasan atau inisiatif inovasi sampai dengan kesiapan implementasinya.

Kesiapan dari Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam mewujudkan program ini adalah dengan menerbitkan Kartu Petani Mandiri (KPM) Plus pertama kali secara simbolis dilakukan oleh Bupati Bojonegoro bersama 2000 Petani di Desa Ngujung Kecamatan Temayang pada hari selasa tanggal 23 Juli 2019, Dinas Pertanian Kabupaten Bojonegoro selaku eksekutor program petani mandiri telah menyiapkan beberapa kebutuhan yang akan di terapkan dalam program ini, diantaranya tentang sumber dana yang akan dipakai dalam mengimplementasikan program petani mandiri dan juga apa saja yang diperoleh petani ketika memegang kartu ini.

Hal ini telah disampaikan oleh Kepala Dinas Pertanian Helmy :

“PPM sendiri adalah dana hibah. Sehingga yang akan didapat petani kedepannya berupa sarana prasarana, bukan uang. Dengan KPM ke depannya bisa digunakan untuk pelatihan, beli pupuk, hasil panennya akan dibeli oleh BUMDes masing-masing, asuransi gagal panen dan dapat digunakan untuk mengakses beasiswa”.

Dari Pernyataan terlihat dari bagaimana pemerintah menerapkan langkah-langkah yang strategis dalam menciptakan program petani mandiri, yaitu yang pertama adalah sebagai akses bagi para petani untuk mendapatkan bantuan modal pertanian yang berwujud barang, dana tersebut bersumber dari Pemerintah Kabupaten

Bojonegoro yang bersifat hibah, selanjutnya memberikan akses prioritas pelatihan dan pengembangan usaha tani demi kemandirian petani, yang ketiga adalah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menjamin pembelian hasil pertanian dengan harga yang layak dan bekerja sama dengan BUMdes.

Manfaat yang akan dirasakan oleh Petani di Bojonegoro selanjutnya adalah petani akan mendapatkan asuransi gagal panen, karena sebelumnya, petani di Bojonegoro sering mengalami gagal panen karena serangan hama, dan kemarau berkepanjangan kondisi seperti ini menjadi ancaman bagi petani, ketika hasil tani tidak sesuai ekspektasi maka petani akan mengalami kerugian. Menyikapi hal tersebut pemerintah Bojonegoro telah menyiapkan solusi bagi para petani yang gagal panen. Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bojonegoro Helmy :

“Selain mendapat akses modal, petani pemilik KPM juga mendapatkan banyak manfaat. Bila mereka gagal panen, petani akan mendapatkan asuransi. Nilainya Rp 6 juta per hektare. Presmi Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) Rp 180 ribu. Dari jumlah itu, 80 persen atau Rp 144 ribu dibayarkan oleh pemerintah pusat. Sisanya Rp 36 ribu dibayarkan oleh Pemkab Bojonegoro”

Dinas Pertanian Kabupaten Bojonegoro juga telah mensosialisasikan ramalan cuaca dari BMKG kepada masyarakat terkait prediksi cuaca, dengan demikian para petani dapat memprediksi memulai menanam dan kapan waktunya merubah pola tanam.

“Pada saat sosialisasi KPM ini kami juga telah menyampaikan kepada masyarakat untuk lebih memperhatikan musim, karena dengan begitu petani bisa memilih apa yang cocok untuk ditanam pada musim hujan ataupun musim kemarau. Prediksi cuaca dari BMKG juga kami sampaikan ditengah-tengah sosialisasi program petani mandiri” tutur Ibu Yuni selaku Kepala Seksi Investasi dan Pembiayaan Usaha Tani Dinas Pertanian.

Dalam mendukung pemberdayaan petani dan menciptakan petani milenial, Dinas Pertanian Kabupaten Bojonegoro akan memberikan jaminan beasiswa dari Pemerintah Kabupaten Bojonegoro untuk mahasiswa yang berprestasi, beasiswa ini diperuntukkan bagi anak petani yang tergabung dalam kelompok tani yang menempuh jurusan pertanian atau peternakan sehingga pemberdayaan petani tidak terputus sampai dengan orang tua saja tapi sampai dengan petani milenial. Hal ini telah disampaikan oleh Ibu Yuni selaku Kepala Seksi Investasi dan Pembiayaan Usaha Tani Dinas Pertanian :

“Bagi anak para petani di Kabupaten Bojonegoro yang menempuh jurusan pertanian ataupun peternakan di perguruan tinggi akan kami berikan

beasiswa supaya nanti mereka akan lebih bersemangat dalam belajar dan pemberdayaan tidak hanya sampai bapak/ibu mereka tapi juga menciptakan petani milenial, perlu diketahui beasiswa KPM ini khusus untuk mahasiswa yang berprestasi dan orang tua mereka tergabung dalam kelompok tani”

Dengan demikian inkubasi inovasi yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam menerapkan inovasi ini sudah terstruktur dengan baik dari awal, terlihat dari kesiapan dari Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam menjawab keluhan dan kebutuhan dari para petani.

### **Diseminasi atau Difusi Inovasi**

Diseminasi atau difusi adalah proses kegiatan menyebarkan informasi ke instansi lainnya secara cepat dan tepat mengenai inovasi yang sudah diterapkan supaya instansi lain yang telah mendapatkan informasi agar terinspirasi membuat inovasi.

Menurut (Nimawati & Zaqiah, 2021) Diseminasi adalah suatu yang ditujukan kepada kelompok target atau individu agar mereka memperoleh, timbul kesadaran, menerima, dan akhirnya memanfaatkan informasi tersebut.

Penyebaran informasi progresif yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui media online, youtube, media cetak lainnya maupun melalui sosialisasi kepada masyarakat desa. Dari penyebaran berita ini masyarakat menjadi mengetahui informasi program petani mandiri. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sangat terbuka kepada masyarakat terbukti dari penyebaran informasi ke media sosial maupun media cetak, program ini dapat dibaca dan dipahami sehingga masyarakat mengerti akan dampak dari Kartu Petani Mandiri (KPM) Plus.

Dampak Kartu Petani Mandiri (KPM) Plus dapat dirasakan langsung oleh masyarakat petani Kabupaten Bojonegoro, Petani di Bojonegoro memerlukan tindakan dan aksi nyata dari Pemerintah, upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas Pertanian dalam menanggapi keluhan di masyarakat patut di apresiasi karena langsung menuju ke sasaran masyarakat selaku target dari penerapan program ini melalui kegiatan diskusi bersama dengan kelompok tani, dengan begitu Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dapat melihat dan mendengarkan secara langsung apa yang dikeluhkan oleh masyarakat.

Kegiatan sosialisasi program petani mandiri dan pembinaan kelompok telah dilakukan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Bojonegoro di Desa Bobol Kecamatan Sekarpada tanggal 22 Juli 2020 yang dihadiri oleh Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani) Desa Bobol. Tujuan diadakannya sosialisasi ini adalah untuk

memberikan informasi yang lebih detail kepada petani Desa Bobol terkait program petani mandiri.

Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bojonegoro.

“Tujuan sosialisasi dan pembinaan ini agar PPM dapat diakses oleh seluruh kelompok tani dan gapoktan. Sehingga mereka dapat memperoleh informasi yang jelas dan mengetahui serta melengkapi syarat-syarat untuk mendapatkan kartu petani mandiri. Dijelaskan, Pemkab Bojonegoro telah menganggarkan PPM. Kelompok tani diharapkan segera mengumpulkan serta melengkapi persyaratan untuk mendapatkan kartu petani mandiri. Semakin cepat dan tepat proses pengumpulan dan verifikasi data maka akan cepat pula proses pencairannya. Sehingga bantuan modal dapat diberikan kepada kelompok tepat waktu pada saat mereka musim tanam”

Hal ini jugadituturkan oleh Ibu Yuni selaku Kepala Seksi Investasi dan Pembiayaan Usaha Tani Dinas Pertanian Kabupaten Bojonegoro :

“Inovasi yang diciptakan oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro ini bertujuan untuk mensejahterakan petani, dan program ini belum pernah ada sebelumnya, manfaat program petani mandiri bisa dilihat pada Peraturan Bupati No.20 Tahun 2019 pasal 2 pada Perbup tersebut sudah tercantum syarat-syarat untuk mengajukan kartu petani mandiri. Nantinya kita akan melakukan verifikasi data bagi kelompok tani yang telah mengusulkan kelompoknya dalam program ini”



Sumber : <https://www.youtube.com/watch?v=OzzDrybVtpQ&t=58s>



Sumber : <https://kumparan.com/beritabojonegoro/kartu-petani-mandiri-solusi-petani-bojonegoro-hadapi-gagal-panen-1rW2gmue7G4>



Sumber : Majalah GEMA Bakesbangpol Kabupaten Bojonegoro.

Salah satu proses penyebaran yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro adalah melalui media online, karena media ini dinilai cukup efektif dalam penyebaran informasi ke masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari pada saat proses launching kartu ini di Desa Ngujung Kecamatan Temayang, para pembaca dapat mengetahui dengan cepat karena diliput oleh media online. Sedangkan yang tidak mengetahui tentang informasi terkait peluncuran kartu petani mandiri, masyarakat bisa mendapatkan informasi dari ketua kelompok tani atau perangkat desa yang turut diundang pada acara launching tersebut.

Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani) merupakan jembatan penghubung antara pemerintah dan masyarakat, dengan adanya gapoktan masyarakat bisa mendapatkan kartu petani mandiri ini karena syarat mutlak untuk bisa mendapatkan kartu petani mandiri ini adalah tergabung dalam Kelompok Tani, maka dari itu Ibu Bupati menghimbau untuk seluruh Petani di Kabupaten Bojonegoro yang belum memiliki kelompok tani untuk segeramembuat atau bergabung dengan kelompok tani di desanya masing-masing. Hal ini Selaras dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Anna Muawannah selaku Bupati Bojonegoro :

“Jika ada petani yang belum terdaftar di kelompok tani, bisa membuat kelompok tani dengan tetangganya. Sebab, didalam peraturan sendiri memperbolehkan setiap desa mempunyai lebih dari 1 kelompok tani. Tidak ada pembatasan jumlah kelompok tani, silahkan buat, minimal 25 KK. Para petani juga tidak perlu khawatir tentang penyerapan gabah, nanti akan diserap oleh BUMDes masing-masing, silahkan bicara ke Kades untuk membentuk Bumdes nanti kita juga ada anggaran untuk Bumdes tersebut, Jadi yang belum memiliki kelompok tani segera bergabung, atau membentuk kelompok tani”

Jadi, para petani yang belum tergabung dalam kelompok tani untuk segera menghubungi kelompok tani di desanya atau juga bisa membentuk kelompok tani karena syarat mutlak untuk memperoleh Kartu Petani Mandiri (KPM) Plus ini harus tergabung dalam kelompok tani.

Dengan penyebaran melalui media-media tersebut membuat instansi lain tergerak untuk melakukan studi banding di Dinas Pertanian Kabupaten Bojonegoro, tercatat sudah dua kabupaten yang telah melakukan studi banding terkait peluncuran Kartu Petani Mandiri yaitu Kabupaten Nganjuk dan Kabupaten Ngawi. Program ini mendapat apresiasi dan tanggapan yang bagus dari instansi pemerintah luar kabupaten karena dengan adanya program ini dapat membantu sektor pertanian.

Hal ini juga diungkapkan oleh Ibu Yuni selaku Kepala Seksi Investasi dan Pembiayaan Usaha Tani Dinas Pertanian :

“Sudah ada yang melakukan studi banding terkait program ini tercatat, sudah dua instansi yang melakukan studi banding pada inovasi program petani mandiri ini yaitu dari Kabupaten Nganjuk dan Kabupaten Ngawi, mereka ingin mengetahui tahapan-tahapan apa saja yang kami lalui sebelum menciptakan inovasi ini dan proses implementasinya kepada masyarakat”.

Dengan demikian penyebaran informasi ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat untuk mengetahui apa saja kegunaan dan fungsi dari Kartu Petani Mandiri (KPM) Plus dan juga penyebaran informasi ini bermanfaat bagi Dinas Pertanian Kabupaten Bojonegoro dalam meningkatkan kualitas inovasi, karena instansi lain yang melakukan studi banding terkait inovasi ini dapat memberikan masukan dan saran supaya nantinya kualitas inovasi ini dapat ditingkatkan.

**Adopsi/Replikasi/Modifikasi Inovasi**

Pada pembahasan indikator ini Inovasi pemerintah dapat dikatakan bagus apabila inovasi yang dibuat bermanfaat bagi pengguna dan bisa dijadikan percontohan untuk instansi lainnya. Instansi lain yang ingin mengadopsi inovasi yang telah dibuat harus dimodifikasi sesuai kebutuhan instansi tersebut supaya terhindar dari plagiarisme.

Menurut (Suripto et al., 2017) Replikasi Inovasi adalah proses adopsi atau adaptasi inovasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publi, baik sebagian maupun secara keseluruhan yang ditransfer dari organisasi asal kepada organisasi penerima.

Bagi instansi yang ingin mengadopsi inovasi pada instansi lain haruslah meminta ijin kepada pihak terkait jika ingin mengadopsi inovasi tersebut, hal ini wajib dilakukan oleh instansi yang akan mengadopsi inovasi

untuk menghindari plagiarisme. Tidak ada larangan untuk mengadopsi inovasi yang telah diciptakan oleh instansi lain selama ada kesepakatan kedua belah pihak.

Hal ini juga disampaikan oleh Ibu Yuni selaku Kepala Seksi Investasi dan Pembiayaan Usaha Tani Dinas Pertanian :

“Kita pernah kedatangan tamu dari luar Kabupaten, namun untuk kegiatan adopsi program sampai saat ini belum ada, hanya saja mereka melakukan studi banding terkait inovasi yang diciptakan oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, jika nanti ada yang mengadopsi program ini boleh saja, tapi yang harus diperhatikan adalah ketika ada yang mengadopsi inovasi program petani mandiri ini haruslah memodifikasi untuk menghindari plagiarisme”

Dari pernyataan diatas kegiatan adopsi sah-sah saja selama mendapatkan persetujuan dan terjadi kesepakatan kedua belah pihak dan harus mengubah konsep inovasi yang telah diciptakan oleh instansi yang ingin diadopsi, konsep inilah yang dinamakan modifikasi inovasi.

Pada saat melakukan studi banding pada program petani mandiri di Dinas Pertanian Kabupaten Bojonegoro, Instansi yang ingin mengadopsi program ini harus memodifikasinya supaya terhindar dari plagiasi serta sesuai dengan kebutuhan instansi tersebut. Oleh karena itu, Dinas Pertanian Kabupaten Bojonegoro selaku pelaksana program petani mandiri harus selalu mendampingi dalam proses adopsi tersebut.

### **Aktualisasi Inovasi**

Pada Tahap ini, Aktualisasi inovasi adalah pelaksanaan inovasi dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan. Menurut (Pratama, Yosua Ivan; Fanida, 2019) Aktualisasi Inovasi adalah bentuk pertanggung jawaban atas pelaksanaan kebijakan yang telah dibuat. Didalam kegiatan aktualisasi lebih ditekankan bagaimana bagaimana upaya merealisasikan atau menciptakan manfaat yang nyata dari program inovasi Kartu Petani Mandiri (KPM) Plus ini, Tentu saja harus dilakukan kegiatan memonitoring dan mengevaluasi terkait pelaksanaan inovasi yang telah dilaksanakan pemerintah daerah. Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui kendala agar segera diperbaiki dan merancang solusi untuk berjalannya inovasi yang berkelanjutan.

Dinas Pertanian Kabupaten Bojonegoro selaku eksekutor program ini wajib melakukan pengawalan terhadap penyaluran kartu ini, melihat apakah program ini tepat sasaran dan sesuai dengan standard dan prosedur, serta melaksanakan pengawasan supaya output program ini sampai kepada sasaran dan berdaya guna. Kegiatan memonitoring dan evaluasi sebagai bentuk pertanggung

jawaban dari pemerintah atas peluncuran Kartu Petani Mandiri (KPM) Plus.

Kasus yang terjadi di lapangan, realitanya belum semua masyarakat yang dapat menikmati manfaat dari program petani mandiri, hal ini disampaikan oleh Ibu Dami salah satu petani warga Desa Grebegan Kecamatan Kalitidu :

“Saya belum mengetahui apa itu kartu petani mandiri, karena belum adanya sosialisasi dari Pemerintah, akan tetapi Saya sempat baca pada media online tentang informasi salah satu program unggulan dari Pemkab Bojonegoro ini, tapi saya belum begitu paham untuk mendapatkan kartu petani mandiri, jadi untuk saat ini belum bisa mendapatkan manfaat dari program ini”.

Disisi lain Mashuri selaku Ketua Kelompok Tani Sumber Tani Desa Grebegan mengonfirmasi bahwa :

“Untuk Pengusulan bantuan program petani mandiri, kami sudah mengusulkan, namun masih ada kekurangan kuota, jadi kami masih membenahi dan menambah jumlah kuota agar nantinya memenuhi syarat untuk pengajuan Kartu Petani Mandiri (KPM) plus”.

Dari pernyataan diatas dapat, ditarik kesimpulan bahwsanya Petani di Desa Grebegan belum mendapatkan Kartu Petani Mandiri, ini menjadi kendala yang harus diperhatikan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Bojonegoro karena belumada beberapa masyarakat yang belum bisa menikmati manfaat dari Kartu Petani Mandiri.

Dinas Pertanian Kabupaten Bojonegoro terus melakukan pembenahan pada program petani mandiri guna mendapati celah atau kekurangan dalam proses penerapannya pada masyarakat di lapangan. Kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Bojonegoro adalah dengan cara melaksanakan evaluasi dan monitoring, dengan begitu program ini bisa berjalan dengan baik dan sesuai harapan. Hal ini juga diungkapkan oleh Ibu Yuni selaku Kepala Seksi Investasi dan Pembiayaan Usaha Tani Dinas Pertanian :

“Kami melakukan kegiatan monitoring pada Kartu Petani Mandiri ini dengan cara mengadakan rapat bersama staff untuk dapat mengetahui apa saja yang kurang dalam proses penyaluran maupun penerapan kartu ini, kami juga berkomunikasi dengan ketua kelompok taniyang telah mendapatkan kartu ini agar selalu dalam pantauan, karena program ini merupakan program yang berkelanjutan jadi, tidak bisa berjalan sendiri tanpa monitoring dari tim kami, kami juga melakukan evaluasi pada saat dilapangan jika menemukan kekurangan terkait pelaksanaan program petani mandiri, pada saat sosialisasi selalu diadakan sesi tanya jawab dari situlah kita bisa menampung masukan-masukan atau aspirasi dari masyarakat.”.

Dalam hal ini, upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Bojonegoro dalam melaksanakan aktualisasi Inovasi Program ini terbilang baik karena telah melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pada penerapan Kartu Petani Mandiri. Pada saat melakukan sosialisasi program ini para peserta juga bisa memberikan masukan-masukan kepada Dinas Pertanian Kabupaten Bojonegoro, dengan begitu dukungan dari masyarakat dapat dirasakan oleh pihak pemerintah, karena ikut andil dalam perkembangan program ini.

Dinas Pertanian Kabupaten Bojonegoro memanfaatkan masukan-masukan tersebut sebagai bahan evaluasi demi kemajuan dari program ini, dari proses evaluasi timbulah proses perbaikan. Dari proses ini diharapkan bisa membantu menutupi celah dan memperbaiki kekurangan dari program petani mandiri.

## PENUTUP

### Simpulan

Indikator pertama Eksplorasi Ide dan Kebutuhan Inovasi. Kesimpulan dari indikator pertama berangkat dari permasalahan dibidang pertanian lalu memikirkan sebuah ide untuk memecahkan permasalahan serta menyusun kebutuhan jangka panjang. Terciptalah ide yaitu menciptakan Kartu Petani Mandiri (KPM).

Indikator kedua adalah inkubasi inovasi artinya kebutuhan untuk mengimplementasikan kartu petani mandiri. Kebutuhan tersebut berupa sumber dana yang akan dipakai untuk menjalankan inovasi. Kebutuhan selanjutnya yaitu kebutuhan petani yaitu pupuk dan perlengkapan pertanian.

Indikator Ketiga Diseminasi atau difusi Inovasi mengenai penyebaran informasi Kartu Petani Mandiri. Penyebaran informasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dengan cara melaunching Kartu Petani Mandiri (KPM) Plus bersama masyarakat, dan juga media online turut membantu tersebarnya informasi tersebut.

Indikator keempat Adopsi/Replikasi/Modifikasi yang mana ketika intansi luar ingin mengadopsi Inovasi dari penggagas inovasi sah-sah saja asal harus mendapatkan persetujuan intansi pencipta inovasi tersebut, dan wajib melakukan modifikasi supaya terhindar dari plagiasi.

Indikator kelima Aktualisasi Inovasi kegiatan melihat apakah pelaksanaan program tersebut sudah sesuai standar dan prosedur, melihat apakah output sampai kepada sasaran ataukah ada penyimpangan, upaya itu bisa dilaksanakan melalui metode monitoring dan evaluasi terkait pelaksanaan inovasi, serta turut mengawal jalannya program, kegiatan tersebut adalah suatu pertanggungjawaban yang wajib dilakukan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Bojonegoro selaku eksekutor Kartu Petani Mandiri (KPM) Plus, proses ini juga turut

andil dalam upaya memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada di dalam inovasi ini.

## Saran

Berdasarkan penelitian diatas, maka peneliti memiliki Saran untuk Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, khususnya kepada Dinas Pertanian Kabupaten Bojonegoro sebagai eksekutor dari inovasi ini agar kedepannya program ini dapat berjalan sesuai harapan dan memberikan dampak yang baik bagi masyarakat. Saran tersebut antara lain:

- 1) Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, disarankan untuk lebih giat dalam mensosialisasikan atau melakukan kegiatan penyuluhan program Kartu Petani Mandiri (KPM) Plus dengan Forum tersebut Pemerintah Kabupaten Bojonegoro bisa mendengarkan aspirasi dari para petani jika ada permasalahan yang baru, dengan cara mendatangi desa-desa se-kabupaten Bojonegoro.
- 2) Menggandeng perusahaan swasta/bumn untuk bekerjasama dalam hal pendanaan Kartu Petani Mandiri, karena lebih besar dana yang dianggarkan untuk program ini semakin besar pula manfaat yang dirasakan oleh masyarakat.
- 3) Mengawasi dan Memastikan distributor pupuk untuk ketersediaan pupuk, karena dengan begitu masyarakat tidak perlu cemas akan pembagian pupuk.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anca Dodescu and Lavinia Florentina Chirilă. 2012. *Regional Innovation Governance in the Context of European Integration and Multi-Level Governance Challenges. A Case Study of North-West Region of Romania*, *Procedia Economics and Finance*, 3.12 (2012)
- Asmara, A. Y., & Rahayu, A. Y. S. (2019). Inovasi Pelayanan Kesehatan Gancang Aron di Kabupaten Banyuwangi dalam Perspektif Matrik Inovasi Sektor Publik. *JPSI (Journal of Public Sector Innovations)*, 3(2), 57-67.
- Kurniati, D., 2015. *Perilaku petani terhadap risiko usahataninya kedelai di Kecamatan Jawai Selatan Kabupaten Sambas*. *Jurnal Social Economic of Agriculture*, 4(1), p.23056.
- McDermott, C. M., & Prajogo, D. I. 2012. Service innovation and performance in SMEs. *International Journal of Operations & Production Management*.

- Nuraisah, G. and Kusumo, R.A.B., 2019. Dampak perubahan iklim terhadap usahatani padi di desa Wanguk kecamatan Anjatan kabupaten Indramayu. *Mimbar Agribisnis: Jurnal Pemikiran Masyarakat Ilmiah Berwawasan Agribisnis*, 5(1), pp.60-71.(Nuraisah and Budi Kusumo 2019).
- Permatasari, I. R., Utoyo, S., & Sulasari, A. 2015. Penguatan Karakteristik Wirausaha Berbasis Inkubasi Inovasi untuk Keberhasilan Usaha Mahasiswa Pmw di Politeknik Negeri Malang.
- Pratama, Y. I., & Fanida, E. H. (2018). Inovasi Sistem Pelayanan Administrasi Kependudukan Kelurahan Dinoyo (Sakdino) Kecamatan Lowokwaru Kota Malang. *Publika*, 6(9).
- Siagian, G.S. and Ikatrinasari, Z.F., 2019 *Pengaruh Manajemen Pengetahuan Terhadap Inovasi: Kasus Industri IT di Indonesia*.
- Solaimani, S., Talab, A.H. and van der Rhee, B., 2019. *An integrative view on Lean innovation management. Journal of Business Research*, 105, pp.109-120.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sari, F. M., & Ibrahim, M. 2014. Penerapan Manajemen Perubahan dan Inovasi. *Jurnal Administrasi Pembangunan*, 2(2), 161-164.
- Suripto, dkk. 2017. *Pedoman Replikasi Inovasi*. Jakarta: LANPRESS
- Thahier, R., 2014. Inovasi Dan Kreativitas Manusia Dalam Manajemen. *Jurnal Administrasi Negara STIA LAN Makassar*, 20(2), p.42636.
- Widodo, Utomo. 2017. *Inovasi Harga Mati Sebuah Pengantar Inovasi Administrasi Negara*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Yustisia, T.V., 2015. *Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Perubahannya*. VisiMedia.
- Peraturan Bupati Bojonegoro No 20 Tahun 2019
- Undang Undang Dasar RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- Undang Undang Dasar RI Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani
- <http://blokbojonegoro.com/2019/07/23/bupati-bojonegoro-launching-kartu-petani-mandiri/>
- <https://kumparan.com/beritabojonegoro/program-petani-mandiri-upaya-pemkab-bojonegoro-sejahterakan-petani-1tfwIruQII>
- <https://money.kompas.com/read/2017/02/19/163912926/negara.agraris.mengapa.harga.pangan.di.indonesia.rawan.bergejolak>
- <https://radarbojonegoro.jawapos.com/read/2020/09/28/216207/kartu-petani-mandiri-kpm-ikhtiar-sejahterakan-petani>
- <http://infopublik.id/kategori/nusantara/469492/sosialisasi-kan-ppm-bupati-program-ini-untuk-sejahterakan-petani-bojonegoro>
- <https://kumparan.com/beritabojonegoro/kartu-petani-mandiri-solusi-petani-bojonegoro-hadapi-gagal-panen-1rW2gmue7G4>

